

Tantangan Guru Sekolah Dasar dalam Menghadapi Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Intan Putri Maharani^{1, a *}, Mahpudin^{2, b}.

¹ Universitas Majalengka1, Majalengka, Indonesia ² Universitas

Majalengka2, Majalengka, Indonesia ^a

intanputrimaharani80@gmail.com ; ^b mahpudin893@gmail.com

* Corresponding Author

Receipt: Artikel dikirim; Revision: Artikel diputuskan revisi; Accepted: Artikel diputuskan diterima @The Author(s) 2024

Abstract:

Educational policy changes in Indonesia, particularly the implementation of the Merdeka Curriculum, require elementary school teachers to adapt as key policy implementers. However, previous studies indicate a significant gap between policy expectations and actual classroom practices. This article aims to identify the main challenges faced by elementary school teachers, analyze their readiness to adapt to 21st-century learning demands, and propose strategies to enhance teacher competence sustainably. This study employs a qualitative approach through a literature review of empirical studies, government policy documents, and relevant educational theories. The findings reveal that teachers face challenges related to limited understanding of learning outcomes, insufficient continuous training, heavy administrative workloads, regional disparities in infrastructure, and psychological pressures such as work-related stress. Teacher readiness also varies depending on geographical context and institutional support. In conclusion, the effective implementation of the Merdeka Curriculum requires systemic support, including practice-oriented professional development, collaborative mentoring models, teacher welfare policies, and the strengthening of adaptive and inclusive school cultures.

Keywords: Merdeka Curriculum, elementary school teachers, education policy, teacher readiness, 21st century learning

Abstrak :

Perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya melalui implementasi Kurikulum Merdeka, menuntut kesiapan guru sekolah dasar sebagai pelaksana utama di lapangan. Namun, berbagai studi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan ideal dan praktik implementasi. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru sekolah dasar, menganalisis kesiapan guru dalam mengadaptasi tuntutan pembelajaran abad ke-21, serta merumuskan strategi peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur terhadap hasil penelitian empiris, dokumen kebijakan, dan teori pendidikan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama guru meliputi keterbatasan pemahaman terhadap capaian pembelajaran, minimnya pelatihan berkelanjutan, beban administratif yang tinggi, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, serta dampak psikologis berupa stres kerja. Selain itu, kesiapan guru masih bervariasi tergantung konteks geografis dan dukungan kelembagaan sekolah. Simpulan kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan dukungan sistemik

PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan respons terhadap tuntutan globalisasi dan kebutuhan untuk membentuk generasi yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Salah satu inovasi terbesar dalam lima tahun terakhir adalah penerapan Kurikulum Merdeka, yang dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi sekolah dan guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Kebijakan ini menekankan pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi pembelajaran, serta penguatan karakter dan profil pelajar Pancasila. Namun, guru sekolah dasar sebagai pelaksana kebijakan di lapangan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan kompetensi hingga adaptasi terhadap teknologi pembelajaran. Menurut Sucipto et al., (2024) banyak guru belum siap secara metodologis untuk menerapkan pendekatan kurikulum baru karena masih terbiasa dengan sistem konvensional berbasis target materi. Tantangan ini juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan intensif dari pemerintah. Dengan demikian, perubahan kebijakan pendidikan memerlukan kesiapan sistemik agar tujuan reformasi dapat tercapai.

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara kebijakan ideal dan realitas pelaksanaan. Secara konseptual, Kurikulum Merdeka merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2013 yang menekankan fleksibilitas pembelajaran dan diferensiasi sesuai karakteristik peserta didik. Jika pada Kurikulum 2013 pembelajaran berorientasi pada struktur KI dan KD yang relatif seragam, Kurikulum Merdeka memberi ruang otonomi yang lebih luas kepada guru melalui penggunaan Capaian Pembelajaran (CP) dan pengembangan modul ajar yang kontekstual (Kemendikbudristek, 2022). Perubahan ini bertujuan menggeser fokus pembelajaran dari penuntasan materi menuju penguatan kompetensi esensial dan pengembangan karakter peserta didik secara holistik. Studi oleh Istiqomah et al., (2025) menemukan bahwa sebagian besar guru di sekolah dasar negeri di Kalimantan Selatan mengalami kesulitan dalam memahami konsep capaian pembelajaran (CP) dan pengembangan modul ajar. Penelitian tersebut menegaskan perlunya pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis agar guru mampu mendesain pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. Data dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek (2022) menunjukkan bahwa hanya 47% guru SD yang telah mengikuti bimbingan teknis Kurikulum Merdeka. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan kesiapan sumber daya manusia di sekolah. Sebagai konsekuensi, efektivitas implementasi kurikulum menjadi tidak merata antar daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru perlu dilakukan melalui model pelatihan berbasis mentoring dan kolaboratif.

Selain itu adaptasi guru terhadap perubahan kebijakan dapat dijelaskan melalui teori perubahan organisasi (*organizational change theory*) dan teori pembelajaran profesional (*professional learning theory*). Guru diharapkan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan paradigma dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Sutanto (2024) menegaskan bahwa perubahan ini membutuhkan reorientasi peran guru sebagai fasilitator dan inovator, bukan sekadar pengajar. Namun, transformasi tersebut sering terhambat oleh budaya organisasi sekolah yang masih tradisional serta resistensi terhadap inovasi. Faktor ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya memerlukan kebijakan teknis, tetapi juga perubahan budaya kerja di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, dukungan kepala sekolah dan komunitas guru menjadi sangat penting untuk membangun atmosfer pembelajaran yang adaptif terhadap kebijakan baru. Dengan kata lain, keberhasilan perubahan pendidikan sangat bergantung pada keselarasan antara kebijakan, budaya sekolah, dan kompetensi guru.

Guru memiliki peran strategis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan. Namun, kebijakan baru seperti Kurikulum Merdeka menuntut kompetensi tambahan yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem pembinaan tersebut. Ningsi et al., (2024) menemukan bahwa sebagian besar guru di DIY mengalami kendala administratif dalam mengikuti program pengembangan profesional akibat keterbatasan waktu dan beban kerja. Kondisi ini menimbulkan dilema antara tanggung jawab profesional dan beban administratif yang berat. Secara empiris, 62% guru menyatakan bahwa mereka memerlukan kebijakan fleksibilitas pelatihan agar dapat menyesuaikan dengan ritme kerja di sekolah. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan turunan yang lebih humanis dan kontekstual dalam mendukung guru menghadapi perubahan kebijakan pendidikan.

Selain faktor kebijakan dan kompetensi, tantangan guru juga muncul dari konteks sosial dan geografis. Zuariah et al., (2024) menemukan bahwa guru di daerah pedesaan Pulau Sumba menghadapi hambatan besar dalam penerapan Kurikulum Merdeka akibat keterbatasan infrastruktur dan akses digital. Di sisi lain, guru di wilayah perkotaan menghadapi tantangan dalam penyesuaian metode pembelajaran berbasis proyek yang menuntut kreativitas tinggi. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat dukungan terhadap daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar kualitas pendidikan dasar dapat meningkat secara merata. Selain itu, perlu dikembangkan sistem pelatihan berbasis daring yang inklusif agar semua guru dapat mengakses pelatihan tanpa hambatan geografis. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada prinsip keadilan (*equity*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

Perubahan kebijakan pendidikan juga berdampak pada dimensi psikologis dan kesejahteraan guru. Mukti et al., (2024) menyoroti bahwa tekanan akibat tuntutan administrasi dan inovasi pembelajaran sering kali menimbulkan stres kerja di kalangan guru sekolah dasar. Banyak guru merasa bahwa perubahan kurikulum tidak diikuti

dengan dukungan kesejahteraan dan pengurangan beban kerja yang proporsional. Hal ini berpotensi menurunkan motivasi dan kinerja guru dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan seharusnya memperhatikan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan kesejahteraan psikologis guru. Implementasi Kurikulum Merdeka perlu diiringi dengan kebijakan pengelolaan beban kerja yang realistis dan dukungan kesehatan mental bagi guru. Dengan demikian, guru dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan secara lebih positif dan produktif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji tantangan utama yang dihadapi guru sekolah dasar dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam implementasi Kurikulum Merdeka, menganalisis kesiapan guru sekolah dasar dalam mengadaptasi perubahan kurikulum terhadap tuntutan pembelajaran abad ke-21, serta menjelaskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan guru sekolah dasar dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan.

METODE (idem)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*literature review*). Metode ini dipilih karena relevan untuk menganalisis fenomena kebijakan pendidikan yang terus berkembang melalui hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Sumber-sumber tersebut mencakup penelitian empiris, kebijakan pemerintah, dan teori pendidikan modern yang berhubungan dengan tantangan guru sekolah dasar dalam menghadapi perubahan kebijakan. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan hasil penelitian, dan mensintesis temuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang isu yang dikaji.

Tahapan kajian literatur ini meliputi empat langkah utama: (1) penentuan topik dan kriteria literatur, (2) pengumpulan dan seleksi sumber, (3) analisis tematik, dan (4) penarikan kesimpulan konseptual. Proses seleksi sumber dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik dan tingkat kebaruan penelitian. Misalnya, studi oleh Istiqomah et al., (2025), Sucipto et al., (2024), dan Ningsi et al., (2024) menjadi rujukan utama dalam memahami tantangan adaptasi guru terhadap kebijakan pendidikan baru. Selanjutnya, hasil-hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten (*content analysis*) untuk menemukan pola, perbedaan, dan kesamaan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar di berbagai konteks wilayah Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teoritis dari *organizational change theory* dan *teacher professional development model* untuk menjelaskan dinamika adaptasi guru terhadap perubahan kebijakan. Pendekatan ini penting karena

perubahan pendidikan tidak hanya memengaruhi struktur sistem, tetapi juga kompetensi dan perilaku individu guru sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, analisis tidak hanya berfokus pada tantangan teknis seperti pelatihan dan sarana, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya organisasi sekolah, dan psikologis guru. Dengan demikian, kajian literatur ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan guru sekolah dasar dari berbagai dimensi kebijakan dan praktik pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya implementasi Kurikulum Merdeka, membawa dampak signifikan terhadap peran dan tanggung jawab guru sekolah dasar. Guru dihadapkan pada perubahan paradigma pembelajaran yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan pendekatan berbasis proyek. Temuan dari berbagai penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar guru mengalami kesulitan dalam memahami konsep capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Sucipto et al., (2024) menegaskan bahwa tantangan terbesar guru terletak pada penyesuaian terhadap metode asesmen baru yang lebih bersifat kualitatif dibandingkan kuantitatif. Tantangan ini menuntut perubahan budaya penilaian yang selama ini cenderung berorientasi pada hasil, bukan proses. Dengan demikian, peran guru sebagai fasilitator pembelajaran menjadi semakin krusial dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Selain itu, hasil studi memperlihatkan bahwa kesiapan dan kompetensi guru masih bervariasi antarwilayah. Berdasarkan temuan Istiqomah et al., (2025), guru di daerah perkotaan cenderung lebih adaptif terhadap perubahan karena memiliki akses terhadap pelatihan dan sumber belajar digital yang lebih baik. Sementara di wilayah pedesaan, keterbatasan infrastruktur, internet, dan fasilitas pembelajaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih menjadi masalah klasik dalam sistem pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan seharusnya diikuti dengan strategi pemerataan akses pelatihan berbasis teknologi. Pendekatan *blended learning* bagi pelatihan guru menjadi salah satu solusi agar guru di semua daerah dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam memahami dan menerapkan kebijakan baru.

Secara empiris, sejumlah penelitian memperkuat temuan bahwa perubahan kebijakan pendidikan membawa dampak psikologis dan administratif yang cukup besar

terhadap guru sekolah dasar. Mukti et al., (2024) melaporkan bahwa banyak guru mengalami peningkatan beban kerja dan stres akibat tuntutan administratif dari Kurikulum Merdeka. Guru dituntut untuk merancang perangkat ajar, modul, dan asesmen berbasis capaian pembelajaran yang sangat berbeda dari kurikulum sebelumnya. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya waktu pelatihan yang memadai dan dukungan teknis di sekolah. Dalam konteks ini, kesejahteraan guru menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan agar mereka dapat bekerja secara optimal. Penguatan dukungan psikologis, kebijakan *work-life balance*, dan sistem supervisi yang empatik menjadi langkah strategis yang dapat diambil pemerintah.

Untuk memperkuat analisis, hasil penelitian terdahulu berikut memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan guru sekolah dasar dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan:

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Fokus dan Temuan Utama
1	Sucipto et al., (2024)	2024	<i>Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar</i>	Guru mengalami kesulitan dalam memahami capaian pembelajaran dan asesmen berbasis proyek.
2	Istiqomah et al., (2025)	2025	<i>Tantangan Adaptasi Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Semangat Dalam 2</i>	Kurangnya pelatihan dan mentoring menghambat implementasi Kurikulum Merdeka.
3	Ningsi et al., (2024)	2024	<i>Identifikasi Tantangan dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka di SD</i>	Guru mengalami kendala administratif dan beban kerja tinggi yang mengurangi efektivitas pembelajaran.
4	Zuariyah et al., (2024)	2024	<i>Tantangan Guru dan Siswa dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar</i>	Ketimpangan infrastruktur dan akses teknologi berdampak pada implementasi kebijakan.

5	Mukti et al., (2024)	2024	<i>Analisis Permasalahan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar</i>	Tekanan administratif dan rendahnya kesejahteraan guru memengaruhi motivasi kerja.
---	----------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Analisis terhadap kelima penelitian di atas menunjukkan adanya tema sentral berupa keterbatasan pelatihan, kesenjangan digital, dan tekanan administratif sebagai tantangan utama guru sekolah dasar. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, hal ini sejalan dengan teori implementation gap, yakni perbedaan antara kebijakan ideal dan realitas di lapangan. Gap tersebut sering kali terjadi karena perencanaan kebijakan tidak disertai dengan evaluasi berkelanjutan terhadap kapasitas pelaksana di tingkat sekolah. Oleh karena itu, solusi yang direkomendasikan adalah memperkuat sistem pendampingan (*mentoring system*) dan pelatihan berbasis kebutuhan nyata guru. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan kompetensi profesional dan rasa percaya diri guru dalam menghadapi kebijakan baru.

Selain faktor struktural dan administratif, pembahasan juga menyoroti pentingnya dimensi sosial dan kolaboratif dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Yansah et al., (2023) menekankan bahwa kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan orang tua merupakan kunci keberhasilan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka. Guru harus memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan agar proses pembelajaran berjalan selaras dengan tujuan kebijakan. Di sisi lain, dukungan kepala sekolah dalam bentuk supervisi akademik yang empatik dapat membantu guru menyesuaikan diri terhadap perubahan. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan keefektifan implementasi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan (*ownership*) guru terhadap kebijakan. Dengan demikian, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif di sekolah dasar.

Hasil pembahasan ini memperlihatkan bahwa tantangan guru sekolah dasar dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan bersifat multidimensional, mencakup aspek kebijakan, kompetensi, teknologi, sosial, dan kesejahteraan. Secara umum, hambatan terbesar terletak pada ketidaksiapan sistem pelatihan guru dan lemahnya

dukungan kelembagaan di tingkat sekolah. Namun demikian, peluang besar tetap terbuka apabila pemerintah dan sekolah mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi digital, pelatihan berbasis praktik, serta kebijakan kesejahteraan guru yang progresif merupakan faktor-faktor kunci yang dapat mempercepat keberhasilan reformasi pendidikan nasional di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dapat disimpulkan bahwa tantangan guru sekolah dasar dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia bersifat multidimensional. Dari segi kebijakan, guru menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, terutama dalam penyusunan capaian pembelajaran dan asesmen berbasis proyek. Kurangnya pelatihan dan pendampingan sistematis menyebabkan kesenjangan implementasi antarwilayah. Dari aspek kompetensi profesional, sebagian besar guru masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pendekatan pedagogis baru yang berfokus pada fleksibilitas dan inovasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis praktik, mentoring, dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.

Tantangan lain muncul dari dimensi sosial, teknologi, dan psikologis. Guru di daerah terpencil menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses digital, sedangkan di daerah perkotaan mereka menghadapi tekanan administratif dan ekspektasi kinerja yang tinggi. Kesenjangan ini berdampak pada kesejahteraan dan motivasi kerja guru dalam menjalankan peran profesionalnya. Oleh karena itu, reformasi pendidikan harus diiringi dengan kebijakan kesejahteraan yang adil serta dukungan psikososial bagi guru. Selain itu, kolaborasi antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi faktor kunci dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan perubahan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana guru dapat menjadi agen perubahan (*change agents*) dalam kelas dan sekolah. Hal ini menuntut dukungan sistemik berupa pengembangan profesional berkelanjutan, supervisi akademik empatik, dan budaya organisasi sekolah yang adaptif terhadap inovasi. Dengan strategi yang tepat, transformasi pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan guru yang lebih kreatif, reflektif, dan berdaya saing global. Secara konseptual, reformasi pendidikan tidak hanya menuntut perubahan kurikulum, tetapi

juga perubahan pola pikir dan struktur dukungan terhadap guru sebagai pelaksana utama kebijakan.

DAFTAR REFERENSI

- Istiqomah, H., Fadhila, A., Febrianti, N., & Jamilah, S. (2025). Tantangan Adaptasi Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Semangat Dalam 2. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 608–618.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mukti, R. A., Yunizha, T. D., & Enjelina, D. (2024). *Analisis Permasalahan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*. 4.
- Ningsi, A., Agustina, A., Hardiyana, M. R., & Nirmala, S. U. (2024). Identifikasi Tantangan dan Strategi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 678–682.
- Sucipto, Muhammad Sukri, Yuyun Elizabeth Patras, L. N. (2024). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(3).
- Sutanto. (2024). Transformasi Pendidikan di Sekolah Dasar : Peran Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Indonesia. *Jurnal Guru Sekolah Dasar*, 1(1), 69–76. <https://doi.org/10.70277/jgsd.v1i1.0009>
- Yansah, O., Asbari, M., Jamaludin, G. M., Marini, A., Insan, U., Indonesia, P., & Jakarta, U. N. (2023). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar : Tantangan dan Peluang. *Journal Of Information and Management*, 02(05), 48–52.
- Zuariah, S. K., Khoirany, N. S., Nurantika, R., & Rahmani, S. N. (2024). Tantangan Guru Dan Siswa Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(03), 172–179. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i03>